

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura)

¹Sarce Pieter
²Kartim

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua
email: sarcepieter777@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Pelaksana pada Bidang Akuntansi di Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 67 responden di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jayapura. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPI meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dari kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Salah satu ciri pokok perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan *transparency* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan empat macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberikan opini WTP atas LKPD ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan/disajikan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan tersebut sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Satu BPK RI Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 542 LKPD Tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%) dan 13 TMP (2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah Provinsi (94%), 327 dari 415 pemerintah Kabupaten (79%), dan 84 dari 93 pemerintah Kota (90%). Capaian target tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60% dan 65% pada tahun 2019 (<https://www.bpk.go.id/ihips>).

Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 (<http://www.jayapurakab.go.id>) pada bulan Maret 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan kelima kali sejak tahun 2014 yang diraih berturut-turut oleh Kabupaten Jayapura. Kendati demikian, dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK masih menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemda Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan realita tersebut di atas, guna tetap terjaganya kualitas laporan keuangan maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat

dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan SAP dilindungi pemerintah sangatlah penting, sebagai salah satu kunci transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintahan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [1]. Namun demikian bertolak belakang dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [2].

Selain faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien [3]. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan luaran-luaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keberhasilan suatu

entitas dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, jika tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia memadai, maka akan semakin meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [4]. Meski demikian peneliti lain menyatakan hal yang berbeda di mana hasil penelitian masing-masing menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [5] dan [6].

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan [4] dan [7]. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan [8] dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan [5].

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pengendalian Intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern (SPI) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pada tingkatan organisasi, tujuan sistem pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan

operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [3] dan [7]. Sementara peneliti lain menyatakan dalam penelitiannya bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan [5].

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, masih terdapat perbedaan hasil penelitian (*inconsistency result*) dari para peneliti terdahulu serta fenomena masih belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kualitas didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis di mana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan [9]. Kualitas sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan [10].

Laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan [11]. Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya [12].

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya [11].

2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan [13]. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat [14]. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sebagai implikasi ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementerian maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu [15]. Permendagri Nomor 2 pasal 1 tahun 2013 menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi [16]. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar mampu memahami logika akuntansi [17].

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan [18]. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat

lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh pernyataan yang menyatakan bahwa kemajuan Teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, dan peningkatan jumlah dan kualitas dalam pelaporan keuangan [19].

2.5. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari sistem pengendalian intern adalah [20]:

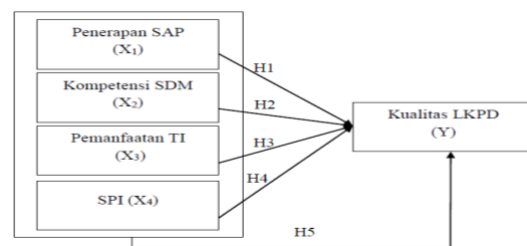
- 2.5.1. Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara;
- 2.5.2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat;
- 2.5.3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal;
- 2.5.4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan);
- 2.5.5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi;
- 2.5.6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Lima unsur sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Selain hal tersebut, PP No. 60 tahun 2008 dalam pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendendalian intern diterapkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai LKPD yang berkualitas.

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konsep Penelitian

2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.7.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh SAP, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [1].

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

2.7.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan

Biro Layanan Informasi dan Komunikasi [4]. Berdasarkan hasil tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pengadilan sewilayah banten menyimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [7]. Berdasarkan hasil kajian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

dalam penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung” menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan [3]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.5. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh SAP, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa Standar Akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [1]. Selanjutnya Penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

terhadap Kualitas Laporan Keuangan menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi. Selain itu penelitian mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pengadilan sewilayah Banten menyimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [7].

Penelitian lainnya berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan [3]. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, diajukan hipotesis penelitian kelima berikut:

H₅ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik [21]. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian. Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kasual antara beberapa variabel. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jayapura yang terletak di Kota Sentani. Populasi dalam penelitian ini adalah unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Jumlah perangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah adalah sebanyak 54 yang terdiri dari 2 Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), Inspektorat, RSUD, 7 Badan, 24 Dinas, dan 19 Distrik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu [22]. *Purposive sampling* ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber sengaja dipilih menggunakan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni: Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Pelaksana di bidang Akuntansi dengan status aktif dan masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), kemudian variabel bebas adalah: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃) dan Sistem Pengendalian Intern (X₄). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R Square).

4. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Kalibrasi

4.1.1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dengan signifikansi 5%. Hasil pengujian validitas disajikan pada tabel 2. berikut:

Tabel 2: Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kualitas LKPD (Y)	Y ₁	0.618	0.000	Valid
	Y ₂	0.768	0.000	Valid
	Y ₃	0.743	0.000	Valid
	Y ₄	0.790	0.000	Valid
	Y ₅	0.646	0.000	Valid
	Y ₆	0.601	0.000	Valid
	Y ₇	0.723	0.000	Valid
	Y ₈	0.821	0.000	Valid
Penerapan SAP (X ₁)	X _{1.1}	0.758	0.000	Valid
	X _{1.2}	0.681	0.000	Valid
	X _{1.3}	0.804	0.000	Valid
	X _{1.4}	0.899	0.000	Valid
	X _{1.5}	0.821	0.000	Valid
	X _{1.6}	0.920	0.000	Valid
	X _{1.7}	0.920	0.000	Valid
	X _{1.8}	0.920	0.000	Valid
	X _{1.9}	0.899	0.000	Valid
	X _{1.10}	0.899	0.000	Valid
	X _{1.11}	0.920	0.000	Valid
	X _{1.12}	0.899	0.000	Valid
Kompetensi SDM (X ₂)	X _{2.1}	0.559	0.000	Valid
	X _{2.2}	0.777	0.000	Valid
	X _{2.3}	0.481	0.000	Valid
	X _{2.4}	0.800	0.000	Valid
	X _{2.5}	0.744	0.000	Valid
	X _{2.6}	0.744	0.000	Valid
Pemanfaatan TI (X ₃)	X _{3.1}	0.809	0.000	Valid
	X _{3.2}	0.809	0.000	Valid
	X _{3.3}	0.815	0.000	Valid
	X _{3.4}	0.751	0.000	Valid
	X _{3.5}	0.829	0.000	Valid
	X _{3.6}	0.796	0.000	Valid
SPI (X ₄)	X _{4.1}	0.597	0.000	Valid
	X _{4.2}	0.552	0.000	Valid
	X _{4.3}	0.573	0.000	Valid
	X _{4.4}	0.608	0.000	Valid
	X _{4.5}	0.608	0.000	Valid
	X _{4.6}	0.398	0.000	Valid
	X _{4.7}	0.573	0.000	Valid
	X _{4.8}	0.690	0.000	Valid
	X _{4.9}	0.714	0.000	Valid
	X _{4.10}	0.398	0.000	Valid

Hasil dari pengujian validitas pada tabel 2. menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel penelitian ini dapat dikatakan valid dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas kajian ini menggunakan *Cronbach's alphas* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0.60 artinya apabila $\alpha = 0.60$ maka instrumen dapat dikatakan *reliable*. Hasil pengujian reliabilitas terlihat pada tabel 3:

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas LKPD (Y)	.905	0.60	Reliable
Penerapan SAP (X ₁)	.945	0.60	Reliable
Kompetensi SDM (X ₂)	.945	0.60	Reliable
Pemanfaatan TI (X ₃)	.923	0.60	Reliable
SPI (X ₄)	.923	0.60	Reliable

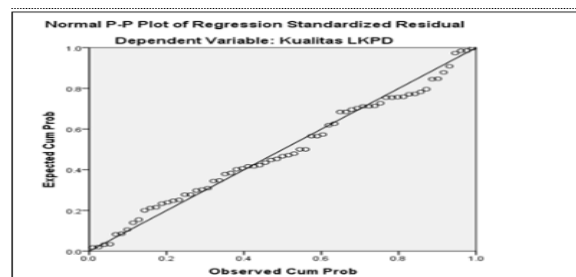
Sumber: Data di olah (2020)

Seluruh variabel terteliti dalam kajian ini ternyata memiliki *Cronbach's Alpha* diatas 0.60 sehingga seluruh data penelitian ini dapat dikatakan *reliable* yang artinya data ini layak untuk dilanjutkan pada pengolahan data tahapan selanjutnya.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1. Uji Normalitas

Normal tidaknya distribusi data penelitian dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probability plot*. Tampilan hasil pengujian *normal probability plot* data penelitian terlihat pada gambar 2.



Gambar 2: Normal probability plot.

Sumber : Data diolah, (2020)

Berdasarkan *normal probability plot* diatas, tersebut menunjukkan bahwa distribusi data hasil observasi hampir mendekati normal.

Untuk lebih memperkuat asumsi normalitas maka dilakukan pengujian menggunakan metode *Kolmogorov-smirnov*. Jika nilai *Asymp sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4
One Sample KS Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.55502664
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
Test distribution is Normal		

Hasil output One Sample KS

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel pengujian *Kolmogorov-smirnov* didapatkan hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari nilai signifikan 0,05 sehingga disimpulkan data berdistribusi normal dan dalam hal ini asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.3.2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas kajian ini menggunakan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil Pengujian multikolinieritas seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel 5
Pengujian Multikolinieritas

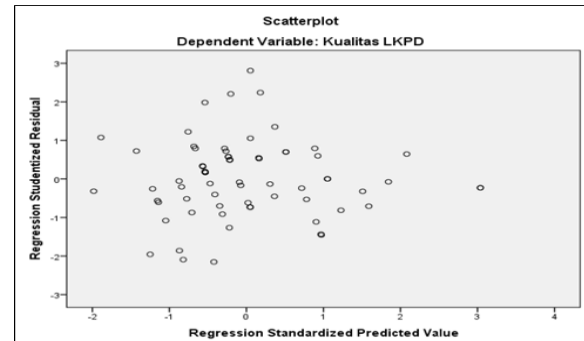
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Penerapan SAP (X ₁)	.391	2.559
Kompetensi SDM (X ₂)	.435	2.297
Pemanfaatan TI (X ₃)	.183	5.455
SPI (X ₄)	.214	4.668

Sumber: Data diolah (2020)

Data diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.1.3.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*. Berikut ini adalah hasil pengujian heterokedastisitas yang terlihat pada gambar *charts scatterplot* berikut ini:



Gambar 3. Scatterplot

Sumber: Data diolah, (2020)

Gambar 3. menunjukkan bahwa data penelitian bebas heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dibuktikan juga menggunakan uji Glejser, dengan ketentuan jika nilai signikansi pengaruh variabel independen terhadap nilai absolut residual lebih besar dari 0,05 maka penelitian dikatakan tidak heteroskedastisitas. Adapun hasil analisis menggunakan uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil uji Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	2.047	.853		2.401	.019
Penerapan SAP (X ₁)	-.040	.029	-.277	-1.402	.166
Kompetensi SDM (X ₂)	.008	.027	.052	.276	.784
Pemanfaatan TI (X ₃)	.018	.050	.103	.359	.721
SPI (X ₄)	-.011	.033	-.092	-.344	.732

Dependent Variable: Abs Res

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6, hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai signifikansi penerapan SAP sebesar 0,166, kompetensi SDM sebesar 0,784, pemanfaatan TI sebesar 0,721, dan SPI sebesar 0,732. Nilai ini lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi heterokedastisitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil analisis regresi berganda yang terlihat dibawah ini.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-8.082	1.384			-5.839	.000
Penerapan SAP (X ₁)	.162	.047	.147		3.445	.001
Kompetensi SDM (X ₂)	.162	.044	.147		3.641	.001
Pemanfaatan TI (X ₃)	.496	.082	.380		6.086	.000
SPI (X ₄)	.369	.054	.395		6.845	.000

Dependent Variable: Kualitas LKPD

Sumber: Data diolah (2020)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:

$$Y = (-8,082) + 0,162X_1 + 0,162X_2 + 0,496X_3 + 0,369X_4 + e$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian:

- 4.2.1. Nilai konstanta -8,082 menjelaskan bahwa apabila variabel independen yaitu penerapan SAP (X₁), kompetensi SDM (X₂), pemanfaatan TI (X₃) dan SPI (X₄) bernilai konstan atau tidak ada perubahan maka kualitas LKPD bernilai -8,082.
- 4.2.2. β₁ (nilai koefisien regresi X₁) 0,162 menjelaskan bahwa jika penerapan SAP (X₁) meningkat dengan asumsi variabel independen lain bernilai konstan (tetap) maka kualitas LKPD meningkat sebesar 0,162.
- 4.2.3. β₂ (nilai koefisien regresi X₂) 0,162 menjelaskan bahwa jika kompetensi SDM (X₂) meningkat dengan asumsi variabel lain konstan (tetap) maka kualitas LKPD meningkat sebesar 0,162.
- 4.2.4. β₃ (nilai koefisien regresi X₃) 0,496 menjelaskan bahwa jika pemanfaatan TI (X₃) meningkat dengan asumsi variabel lain konstan (tetap) maka kualitas LKPD meningkat sebesar 0,496.
- 4.2.5. β₄ (nilai koefisien regresi X₄) 0,369 menjelaskan bahwa jika SPI (X₄) meningkat dengan asumsi variabel lain konstan (tetap) maka kualitas LKPD meningkat sebesar 0,369.

Berdasarkan analisis regresi di atas dapat menjelaskan kontribusi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Penerapan SAP memiliki nilai koefisien standarisasi sebesar 0,147 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,792. Ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP memiliki kontribusi sebesar (0,162 x 0,792 = 0,1163) atau sebesar 11,63%.

Kompetensi SDM memiliki nilai koefisien standarisasi sebesar 0,147 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,786. Ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM memiliki kontribusi sebesar (0,162 x 0,786 = 0,1155) atau sebesar 11,55%.

Pemanfaatan TI memiliki nilai koefisien standarisasi sebesar 0,380 dengan koefisien korelasi sebesar 0,936. Ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan TI memiliki kontribusi sebesar (0,380 x 0,936 = 0,3556) atau sebesar 35,56%.

Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai koefisien standarisasi sebesar 0,395 dengan koefisien korelasi sebesar 0,931. Ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki kontribusi sebesar (0,395 x 0,931 = 0,3667) atau sebesar 36,67%.

Dengan demikian, variabel yang paling dominan atau yang paling banyak memberi kontribusi dari keempat variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel Sistem Pengendalian Intern dengan hasil kontribusi sebesar 36,67%.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji t (Pengujian Parsial)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPI terhadap kualitas LKPD juga untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hasil uji t (pengujian parsial) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Uji t

Model	Coefficients					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t hitung	t tabel
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-8.082	1.384			-5.839	1.996
Penerapan SAP (X ₁)	.162	.047	.147		3.445	.001
Kompetensi SDM (X ₂)	.162	.044	.147		3.641	.001
Pemanfaatan TI (X ₃)	.496	.082	.380		6.086	.000
SPI (X ₄)	.369	.054	.395		6.845	.000

Sumber : Data diolah, (2020)

- 4.3.1.1. Berdasarkan Tabel hasil pengujian parsial variabel penerapan SAP memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,445 > t_{tabel} 1,996 dengan angka probabilitas sebesar 0,001 < 0,05 atau (0,001 lebih kecil dari 0,05), signifikansinya bernilai

positif (+) dan koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 0,147; dengan demikian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis satu (**H1**) diterima.

4.3.1.2. Hasil pengujian parsial variabel kompetensi SDM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,641 > t_{tabel} 1,996 dengan angka probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$ atau (0,001 lebih kecil dari 0,05), signifikansinya bernilai positif (+) dan koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 0,147; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis dua (**H2**) diterima.

4.3.1.3. Hasil pengujian parsial variabel pemanfaatan TI memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,085 > t_{tabel} 1,996 dengan angka probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ atau (0,000 lebih kecil dari 0,05) signifikansinya bernilai positif (+) dan koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 0,380, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis tiga (**H3**) diterima.

4.3.1.4. Hasil pengujian parsial variabel SPI memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,845 > t_{tabel} 1,996 dengan angka probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ atau (0,000 lebih kecil dari 0,05) signifikansinya bernilai positif (+) dan koefisien regresinya bertanda (+) yaitu 0,395; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis empat (**H4**) diterima.

4.3.2. Uji F (Pengujian Simultan)

Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen (penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPI) terhadap variabel

dependen (kualitas LKPD). Hasil uji F (pengujian simultan) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Uji F

ANOVA ^a							
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	F tabel	Sig.
1	Regression	439,280	4	109,820	334,890	2,52	.000 ^b
	Residual	20,332	62	.328			
	Totak	459,612	66				
a. Dependent Variabel: Kualitas LKPD							
b. Predictors: (Constant), SPI, Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI							

Sumber : Data diolah, (2020)

Berdasarkan tabel pengujian secara simultan penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPI memiliki nilai F_{hitung} sebesar 334,890 > dari F_{tabel} 2,52 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ atau (0,000 lebih kecil dari 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis lima (**H5**) diterima.

4.3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R Square)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.953	.573
a. Predictors: (Constant), SPI, Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI				
b. Dependent Variabel: Kualitas LKPD				

Sumber : Data diolah, (2020)

Berdasarkan Tabel hasil output *Model Summary* nilai *Adjust R square* (R^2) adalah sebesar 0,953 menunjukkan bahwa 95,3% variasi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan sisanya (100% - 95,3% = 4,7%) dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.4. PEMBAHASAN

4.4.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} variabel Penerapan Standar Akuntansi yaitu sebesar 3,445, nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,996. Tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ atau (0,001 lebih kecil dari 0,05). Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Suatu pemerintahan dalam proses akuntansi maupun pelaporan keuangannya perlu menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan dan dijadikan acuan oleh pemerintah untuk digunakan dalam setiap standar pelaporan akuntansi oleh Instansi maupun Lembaga [23]. Penerapan Standar Akuntansi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari persepsi Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang Akuntansi pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya SAP maka kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dapat dihindari dengan adanya standar baku yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan sebagai pemodaman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [1] dan [24].

4.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu sebesar 3,641, nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,996. Tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ atau (0,001 lebih kecil dari 0,05). Kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang Akuntansi yang menyatakan bahwa adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten maka akan mendukung ketepatan waktu dalam pembuatan serta penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [7].

4.4.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu sebesar 6,085, nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,996. Tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau (0,000 lebih kecil dari 0,05). Teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi akuntansi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang Akuntansi yang menyatakan pentingnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan diterapkannya teknologi informasi dalam kegiatan akuntansi maka akan lebih mempermudah dan mempercepat

pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan [8].

4.4.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} variabel Sistem Pengendalian Intern yaitu sebesar 6,845, nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,996. Tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau (0,000 lebih kecil dari 0,05). Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern dengan melakukan langkah-langkah seperti pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian yang sudah ada. Sistem Pengendalian Intern yang baik memberi dampak yang baik dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang akuntansi pada Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian intern telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan pada setiap Perangkat Darerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [3] dan [7].

4.4.5. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara independen terhadap variabel dependen. Hal ini terlihat dari hasil output uji F pada tabel Anova yang menampilkan nilai F_{hitung} sebesar 334,890 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai F_{hitung} 334,890 lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 2,52. Hasil ini berarti bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tekonologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari tanggapan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta ASN selaku Pelaksana dibidang akuntansi pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang berpendapat masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang besar dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian apabila variabel independen (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern diterapkan secara bersama-sama secara setiap Perangkat Daerah, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- 5.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- 5.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- 5.4. Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

- terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
- 5.5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Irsan, Suratno, and J. M. V Mulyadi, "Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Pengelola Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," vol. 3, no. 3, pp. 193–210, 2019.
- [2] R. Azzindani and E. Pituringsih, "Pengaruh Implementasi SIMDA , Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 27, pp. 418–445, 2019.
- [3] Aminah, Kairudin, and Indrayenti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 10, no. 1, pp. 22–23, 2019.
- [4] N. Zubaidi, D. Cahyono, and A. Maharani, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan," vol. 3, no. 2, pp. 68–76, 2019.
- [5] F. Y. Ernawati and R. Budiyo, "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan tehnologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan rumah sakit umum di kabupaten blora," *MALA'BI J. Ekon. Manaj.*, vol. 1, no. 2, 2019.
- [6] S. A. Sholohah and A. I. Sulistyawati, "Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *FOKUS Ekon. J. Ilm. Ekon. P-ISSN 1907-1603 E-ISSN 2549-8991 Accredited SK No. 21E/KPT/2018*, vol. 13, no. 2, pp. 280–300, 2018.
- [7] D. Wuylan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Pengadilan Sewilayah Banten," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2017.
- [8] Mulyadi and P. Haryoso, "Peranan Sistem Pengendalian Internal dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Surakarta," *ProBank J. Ekon. Dan Perbank. ISSN 2579-5597 (online) ISSN 2252-7885*, vol. 4, no. 1, pp. 78–97, 2019.
- [9] D. . Goetsch and S. Davis, *Quality Management For Organizational Excellence: Introduction to Total Quality*. NJ: Printice Hall International, Inc, 2010.
- [10] Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2010.
- [11] D. Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- [12] Erlina, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Kedua*. Medan: USU Press. 2008.
- [13] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- [14] Abusyadza, "Standar Akuntansi Pemerintahan," 2007.
- [15] Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- [16] A. Azhar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- [17] Warisno, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi," *Tesis S2 Progr. Pascasarj. Univ. Sumatera Utara Medan*, 2009.
- [18] Desmiyawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatanwaktuan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemda Riau)," *J. Akunt.*, vol. 2, no. 2, 2014.
- [19] Novriani and Naniek, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi terhadap Perkembangan Akuntansi," *J. Akunt.*, 2007.
- [20] N. Hasanah and A. Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*. In Media, 2016.
- [21] Indriantoro, Nur, and B. Supomo, "Metodologi Penelitian dan Bisnis," Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999.

- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [23] Azlim, Darwanis, and U. A. Bakar, "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh," *J. Akunt.*, vol. 1, no. 1, 2012.
- [24] Y. A. Hasanah, N. Sasongko, and A. D. B. (Univeristas M. S. Bawono, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *9th Univ. Res. Colloquium 2019*, pp. 150–155, 2019.